



**PEMERINTAH KOTA BIMA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)**

**INSPEKTORAT KOTA BIMA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**



**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bima disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bima ini untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kota Bima tahun anggaran 2020 kepada pihak yang berkepentingan.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 ini, Inspektorat Kota Bima dalam melaksanakan tugasnya di masa mendatang akan lebih terarah dan tepat sasaran

Kota Bima, Februari 2021

INSPEKTUR

INSPEKTORAT KOTA BIMA,



**Muhaimin, SE**

Pembina Utama Muda ( IV/c )

NIP. 19620217 199003 1 010

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Lampiran .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
C. ASPEK STRATEGIS .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2023.....	12
B. PERJANJIAN KINERJA .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>25</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	25
1. Perbandingan Antara Target dan Relisasi Kinerja Tahun Ini.	25
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	32
3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra.	39
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.....	47
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	62
6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	66
B. REALISASI ANGGARAN .....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. KESIMPULAN .....	75
B. SARAN .....	76

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bagan Organisasi Inspektorat Kota Bima  
Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2018-2023  
Penetapan Kinerja Tahun 2020  
Rencana Kinerja Tahun 2020  
Pengukuran Kinerja Tahun 2020

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bima, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan laporan tersebut yang menggambarkan kinerja Inspektorat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun yang menjadi dasar hukumnya sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima:

## **B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima adalah:

1. Tugas

Inspektorat Kota Bima mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.

2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah
- d. Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **2. STRUKTUR ORGANISASI**

Adapun Struktur organisasi Inspektorat Kota Bima per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

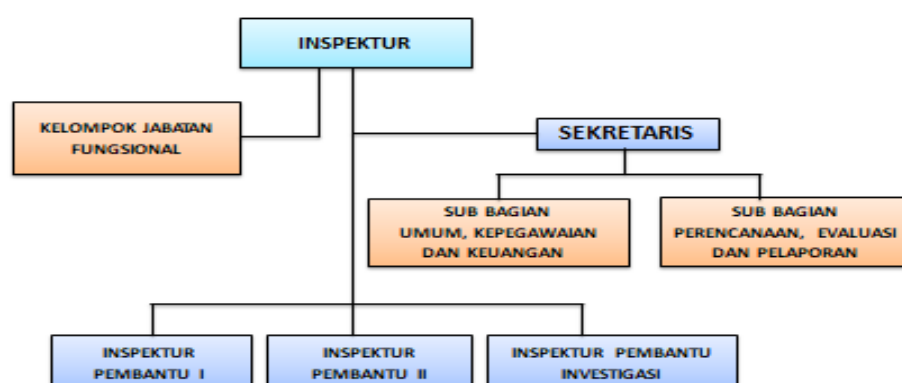
1. Inspektur
2. Sekretaris
  - a. Kepala Sub Bagian Umum,Keuangan dan Kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Investigasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Kota Bima mulai melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan angka kreditnya serta Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional P2UPD dan angka kreditnya maka ada 2 kelompok jabatan fungsional di Inspektorat

- a. Jabatan Fungsional Auditor
- b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan.

*Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bima Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2020*



### 3. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kota Bima per Desember 2020 berjumlah 56 personil, dengan komposisi sebagai berikut :

#### 1. Menurut Jabatan/Eselon

- Inspektur /Iib : 1 orang
- Sekretaris/IIIa : 1 orang
- Inspektur Pembantu/IIIa : 3 orang
- Kepala Sub Bagian/IVa : 2 orang
- Pejabat Fungsional : 33 orang
- Staf : 16 orang

#### 2. Menurut Tingkat Pendidikan :

- S 3 : 0 orang
- S 2 : 9 orang
- S 1 : 41 orang
- D 3/Sarjana Muda : 0 orang
- SLTA : 6 orang
- SMP : 0 orang

#### 3. Menurut Golongan/Ruang

- Golongan IV/c : 1 orang
- Golongan IV/b : 1 orang
- Golongan IV/a : 5 orang
- Golongan III/d : 11 orang
- Golongan III/c : 23 orang
- Golongan III/b : 9 orang
- Golongan III/a : 1 orang
- Golongan II/d : 0 orang
- Golongan II/c : 0 orang
- Golongan II/b : 5 orang
- Golongan II/a : 0 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM di Inspektorat Kota Bima Belum cukup menunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Adapun komposisi pegawai berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, tergambar sebagai berikut :



Tabel 1  
Keadaan SDM Inspektorat Kota Bima  
Per Desember 2020

No	Eselon	Gol/Ruang (orang)					Tingkat Pendidikan							
		IV	III	II	I	Non Gol.	SD	SMP	SMA	D3/SM	S1	S2	S3	
1.	II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2.	III	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
3.	IV	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
4.	Fungsional	2	31	-	-	-	-	-	-	-	-	30	3	-
5.	Staf	-	11	5	-	-	-	-	6	-	-	7	3	-
JUMLAH		6	45	5	-	-	-	-	6	-	-	41	9	-

#### 4. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Inspektorat Kota Bima memerlukan prasarana pendukung. Sampai saat ini Inspektorat Kota Bima belum memiliki gedung kantor sendiri dan menempati eks Kantor Walikota Bima di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2 Kota Bima. Sedangkan

Sarana digunakan untuk pendukung kegiatan operasional Inspektorat. Adapun sarana dan prasara yang dimiliki Inspektorat Kota Bima antara lain:

- a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
- b. Fasilitas komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet dan mesin faksimili;
- c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis pengawasan, dilengkapi dengan ketersediaan printer,
- d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital dan LCD proyektor;
- e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemaries, air conditioner (AC), dispenser, kipas angin dan televisi;
- f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

## **5. PENGANGGARAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Tahun 2020 Inspektorat Kota Bima didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 sebesar Rp.9.092.922.527,50,- (Sembilan Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh, Lima Puluh Rupiah), dan terjadi penurunan anggaran pada APBD perubahan sebesar Rp. 677.257.456,85 atau total APBDP sebesar Rp.8.415.666.070,65 (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Koma Enam Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.8.117.503.091,00 (Delapan Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah), atau 96,46%. (Sembilan Puluh Enam Koma Empat Puluh Enam Porsen).

Berikut disajikan data realisasi anggaran pada Inspektorat Kota Bima tahun 2013-2018.

Tabel 2 : Realisasi anggaran Inspektorat Kota Bima

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Belanja Pegawai	Rp 369.716.800,00	Rp 279.548.000,00	Rp 180.815.000,00	Rp 939.885.000,00	Rp 910.250.000,00	Rp 357.416.800,00	Rp 241.564.800,00	Rp 178.395.000,00	Rp 911.890.000,00	Rp 838.840.000,00	Rp 836.306.640,00	Rp 767.356.640,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.914.355.900,00	Rp 1.805.632.000,00	Rp 1.920.323.262,00	Rp 2.472.856.250,00	Rp 2.765.050.000,00	Rp 1.840.554.584,00	Rp 1.679.607.401,00	Rp 1.915.215.568,00	Rp 2.430.259.091,00	Rp 2.679.738.580,00	Rp 2.382.178.820,00	Rp 2.062.148.174,20
3.	Belanja Modal	Rp 133.955.000,00	Rp 54.820.000,00	Rp 16.480.000,00	Rp 61.570.000,00	Rp 49.700.000,00	Rp 121.524.000,00	Rp 54.132.000,00	Rp 16.480.000,00	Rp 61.570.000,00	Rp 49.700.000,00	Rp 22.909.000,00	Rp 37.265.200,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.418.027.700,00</b>	<b>Rp 2.140.000.000,00</b>	<b>Rp 2.117.618.262,00</b>	<b>Rp 3.474.311.250,00</b>	<b>Rp 3.725.000.000,00</b>	<b>Rp 2.319.495.384,00</b>	<b>Rp 1.975.304.201,00</b>	<b>Rp 2.110.090.568,00</b>	<b>Rp 3.403.719.091,00</b>	<b>Rp 3.568.278.580,00</b>	<b>Rp 3.241.394.460,00</b>	<b>Rp 2.866.770.014,20</b>

Berdasarkan data di atas tergambar jelas bahwa realisasi keuangan Inspektorat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa realisasi belanja mengalami fluktuasi, namun apabila dipotret antara tahun 2017 dan 2018 maka terjadi penurunan anggaran pada pos belanja pegawai, dan terjadi peningkatan pada belanja barang dan jasa serta penurunan pada belanja modal.

### **C. ASPEK STRATEGIS.**

---

Pengawasan (*controlling*) adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai kebijaksanaan, program dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab pimpinan / manajer pada tingkat manapun. Hakekatnya Pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya pemborosan, penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Demikian halnya dengan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bima, untuk dapat mencapai tujuan dan tugas-tugas bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka fungsi Pengawasan menjadi sangat penting. Fungsi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bima.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); menekankan pentingnya pengawasan yang penjabarannya antara lain diatur dalam PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- Inspektorat Kota Bima mempunyai kompetensi pengawasan atas semua *obyek pemeriksaan* yang ada di wilayah Pemerintah Kota

Bima, kecuali yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

- Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan / atau diminta oleh Inspektorat Kabupaten/Kota berdasarkan sinergi pengawasan.
- Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi dibidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

Dalam menghadapi era globalisasi dan otonomi daerah kita perlu merencanakan strategi yang komprehensif. Untuk itu Inspektorat menyikapi dengan menghimpun data-data yang berpengaruh terhadap keberadaan lembaga pengawasan pada masa yang akan datang meliputi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*).

Berdasarkan analisis terhadap kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Kota Bima dapat disampaikan beberapa aspek seperti terurai dalam matriks berikut:

Tabel 3:

**Isu strategis dan Permasalahan utama Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Bima**

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
1	2	3	4	5
Efektifitas dampak pemeriksaan	Masih Belum Efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan setiap hasil pemeriksaan	Semakin rendahnya jumlah temuan Pemeriksaan	Keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap lama Waktu Pemeriksaan	Komitmen kepala OPD untuk TL Temuan pemeriksaan Dan masih rendahnya Penerapan SPIP Di intrn OPD
Kualitas Auditor	Sebagian Besar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah masih berada dalam level 1 (Initial) dan 2 (Infrastructure)	Kondisi saat ini Seharusnya kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah sudah berada pada level 3 (Integrated)		Terbatasnya penyelenggaraan Bintek-Bintek yang berkaitan dengan pengawasan

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Internal	Eksternal
1	2	3	4	5
		atau level 4(Managed) atau 5(Optimized)		
Kuantitas Auditor	Hanya ada 10 orang auditor, dan hanya 9 P2UPD	Seharusnya Inspektorat Kota Bima memiliki 40 Orang Auditor dan 30 P2UPD	Keterbatasan Formasi untuk Rekrutmen tenaga Auditor	Pendidikan JFA yang penyelenggaraannya masih sangat terbatas
Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan	Kualitas LHP belum memenuhi standar pemeriksaan dan Masih kurangnya tenaga fungsional Auditor yang telah mengikuti Diklat Sertifikasi JFA	LHP yang sesuai dengan standar Pemeriksaan	Keterbatasan program Peningkatan kapasitas Mandiri ( PKM )	Belum pernah dilaksanakannya Bintek Penulisan LHP yang Efektif.

Uraian dalam matriks diatas menunjukkan bahwa tingginya temuan pemeriksaan sangat bergantung pada komitmen pimpinan OPD yang menjadi auditi disamping ketersediaan tenaga yang berkualitas dan profesional mendorong terwujudnya pengawasan yang efektif. Beberapa hal ini yang menjadi fokus Inspektorat Kota Bima dalam mencapai visi organisasi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### **A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2023**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Bima telah menyusun rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2018 – 2023 tentunya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Adapun salah satu misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan indikator pemerintah daerah yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima sekaligus sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi Inspektorat Kota Bima sebagai berikut :

1. Misi ke 3 (tiga) Pemerintah Kota Bima : ***Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik..***
2. Sasaran strategis Pemerintah Kota Bima : ***Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah***
3. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Bima :
  - a. ***Peningkatan kualitas penilaian kinerja dan pelaporan***
  - b. ***Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah***
4. Indikator Kinerja Pemerintah Kota Bima :
  - a. ***Opini BPK terhadap LKPD***
  - b. ***Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/Nilai SAKIP***

Untuk mendukung tercapainya RPJMD sebagaimana tersebut diatas maka rencana strategik Inspektorat Kota Bima yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2020 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020.

## 1. Visi

Dalam Keppres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran sebuah organisasi yang diinginkan di masa depan.

Visi juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023.

Sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan Inspektorat Kota Bima dituntut untuk dapat menetapkan visi sebagai bagian dari rencana strategik organisasi. Visi senantiasa diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi menuju keadaan yang diharapkan.

Visi Inspektorat Kota Bima adalah

**“Terciptanya Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi, dan Efektifitas Dalama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Profesionalisme Aparatur Inspektorat”**

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan maka Inspektorat Kota Bima menyusun misi dengan jelas yang akan diemban/ dilaksanakan dalam menuju tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Ada 4 ( empat ) misi yang ditetapkan oleh Inspektorat Kota Bima yang menjadi pegangan dalam merumuskan dan mengemban langkah selanjutnya, yaitu :

1. Meningkatkan Integritas dan Dedikasi Aparatur Inspektorat.
2. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pengawasan.
3. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.



4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bima.

Penjabaran misi selanjutnya kedalam bentuk yang lebih operasional telah dituangkan dalam pernyataan perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dengan indikator serta target yang akan dicapai pada tahun 2020 serta program kegiatan dan anggaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai langkah strategis yang selanjutnya diwujudkan dalam rencana kerja untuk mencapai target yang dijanjikan.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tahun 2020, Inspektorat Kota Bima telah menetapkan rencana kerja tahunan dengan mengacu kepada sasaran strategis pemerintah daerah yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yaitu Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik Baik dengan indikator Kinerja : Opini BPK terhadap LKPD dan Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/Nilai SAKIP. Untuk menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima tersebut, maka Inspektorat Kota Bima mendukung dengan beberapa sasaran strategis tentunya ditunjang dengan program dan kegiatan yang relevan. Adapun program dan kegiatan tersebut terdiri dari 4 (empat) Program Utama dan 24 (Dua puluh empat) kegiatan utama yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2020 tentu diperlukan sumber dana sebagai salah satu syarat keberhasilan suatu rencana. Dana tersebut juga merupakan salah satu unsur input

yang harus dipenuhi dan mempunyai tolak ukur tersendiri. Dengan demikian mudah dipahami bahwa dalam menyusun rencana strategik dan rencana kinerja tahunan, tidaklah terlepas dari sistem penganggaran pada organisasi Inspektorat Kota Bima.

Pada prinsipnya Perjanjian Kinerja tahun 2020 ini akan menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Bima selama tahun 2020. Target kinerja menggambarkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada setiap program dan kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai misi dan visinya. Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan.

Adapun ikhtisar sasaran strategis, indikator kinerja dan kuantitas capaian kinerja pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yang hendak dilaksanakan dalam tahun 2020 yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4: Ikhtisar sasaran strategis, indikator kinerja dan kuantitas target capaian Pemerintah Kota Bima

NO	SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BIMA	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD	WTP
		2 Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/Nilai SAKIP	BB
<b>Jumlah Anggaran Program</b>		<b>Rp. 2.417.418.047,00</b>	

Selanjutnya dibawah ini akan diungkapkan rincian sasaran strategis indikator kinerja, beserta program dan kegiatan Inspektorat Kota Bima yang menunjang sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima dapat digambarkan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima :**  
**“ Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah”**

Sasaran strategis pemerintah Kota Bima sebagaimana tersebut diatas terdiri dari 2 (dua) Indikator kinerja yang ditunjang dengan 2 (dua) sasaran strategis Inspektorat Kota Bima dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut :

**Indikator Sasaran Pemerintah Kota Bima : “Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPD” dan “ Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Nilai SAKIP “**

Indikator sasaran sebagaimana tersebut diatas dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan gambaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memenuhi kriteria antara lain :

- a. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP).
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping ketiga kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidak pastian dan kesalahan yang cukup berarti (no material uncertainties), pengelolaan atas Cash flow dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang material.

Untuk mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja sebagaimana tersebut diatas, maka Inspektorat kota Bima menunjang dengan sasaran strategis dan indikator kinerja pendukung sehingga dari indikator pendukung tersebut dapat mengukur indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima, adapun sasaran strategis dan indikator kinerja pendukung dimaksud sebagai berikut :

Tabel 5: Ikhtisar sasaran strategis, indikator kinerja dan kuantitas target capaian Inspektorat Kota Bima untuk penunjang indikator kinerja Opini BPK RI dan Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/Nilai SAKIP

NO	SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif , efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil	70,73 %
		2. Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	92,00%
		3. Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Terdefinisi (3,10)
		4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B	82,35%
		5. Persentase SKPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM	20,00%
2.	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1. Level Kapabilitas APIP	Level 3
		2. Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat	35 Orang
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>		<b>Rp. 2.417.418.047,00</b>	<b>100,00%</b>

Sasaran strategis Inspektorat Kota Bima untuk menunjang Indikator pemerintah Kota Bima terdiri dari 2 (dua) sasaran yang ditunjang dengan 7 (tujuh) Indikator kinerja dengan penjelasan masing – masing sebagai berikut :

**Sasaran Strategis Inspektorat 1 : “ Meningkatkan kualitas pengawasan yang efektif dan efisien dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah “**

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya untuk menunjang indikator sasaran stretegis pemerintah Kota Bima yaitu meraih opini WTP maka Inspektorat Kota Bima tentunya harus meningkatkan kualitas pengawasan secara efektif dan efisien. Untuk mengukur pengawasan telah berjalan efektif dan efisien tentunya ditunjang dengan indikator yang relefan, yaitu :

**Indikator Sasaran 1.1 : “ Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil “**

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif dan efisien yaitu membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar – standar yang telah ditentukan terlebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur kemuradanya, serta mengambil tindakan yang diperlukan yang menjamin pemanfaatan penuh sumberdaya yang digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan kinerja organisasi perangkat daerah sudah sesuai dengan standar, tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku maka salah indikator yang perlu diukur adalah terhadap temuan berulang dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian daerah sehingga dapat mempengaruhi akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan salah satu unsur penunjang untuk meraih opini WTP. Indikator kinerja ini ditunjang dengan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 6: Program dan Kegiatan untuk penunjang indikator kinerja Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Menurunnya temuan APIP dan BPK yang Bersifat Material	Persentase menurunnya temuan APIP dan BPK	88,24 %
a	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	a Tertanganinya Pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	a Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan	8
b	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	b Terlaksananya pencengahan penyimpangan perencanaan, pelaksanaan barang dan dan jasa pemerintah	b Jumlah OPD yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa yang dikawal (Proby dan Monev)	6
2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Anggaran Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bima sesuai dengan SAP dan SPI	Sesuai
a	Review laporan keuangan Pemerintah Daerah	a Meningkatkan kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah	a Jumlah OPD yang Laporan keuangannya Sesuai dengan SAP dan SPI	34
b	Review Penyerapan Anggaran	b Meningkatkan penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah	b Persentase Penyerapan Anggaran OPD	100%
c	Review Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	c Meningkatkan penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah	c Persentase Penyerapan Anggaran PBJ (belanja Modal)	99%
d	Review RKPD	d Terciptanya kesesuaian Perencanaan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah	d Persentase Kesuaian Rencana Kerja dengan DPA	99%
e	Review KUA PPAS DAN KUPA PPAS perubahan	e Terciptanya kesesuaian Perencanaan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah	e Persentase Kesuaian Kebijakan Umum Anggaran dengan DPA	99%
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>			<b>Rp. 1.089.821.075,00</b>	<b>100,00%</b>

**Indikator Sasaran 1.2 : “ Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK ”**

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang efektif dan efisien, upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima. Semakin baik pemerintah melaksanakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangannya, yang ditunjukkan dengan semakin sedikitnya temuan terhadap pemeriksaan pada tahun selanjutnya. Adapun program dan kegiatan untuk menunjang indikator sasaran ini terdiri dari 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 7: Program dan Kegiatan untuk penunjang indikator kinerja  
Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Menurunnya temuan APIP dan BPK yang Bersifat Material	Persentase menurunnya temuan APIP dan BPK	88,24 %
a	Inventarisasi hasil temuan	a Tersedianya dokumen hasil pengawasan	a Jumlah dokumen Hasil Inverisasi temuan pengawasan	2
b	Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	b Terlaksananya pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaa APIP dan BPK	b Jumlah Laporan hasil Pemantauan penyelesaian Atas Hasil Pemeriksaan	125
c	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	c Meningkatnya Koordinasi Pengawasan	c Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan	17
d	Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan	d Terlaksananya Evaluasi Hasil temuan	d Jumlah Dokumen Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan.	4
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>			<b>Rp. 602.183.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Indikator Sasaran 1.3 : “ Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima “**

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka memerlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai pemerintahan terutama pada satuan organisasi perangkat daerah Kota Bima, guna memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat Kota Bima melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Inspektorat Kota Bima berupaya melakukan pengawasan atas penyelenggaraan SPIP yang pada organisasi perangkat daerah Kota Bima dengan menentukan sasaran strategis yaitu Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku guna menunjang Sasaran dan indikator utama pemerintah Kota Bima.

Sebagai unsur pertama dalam SPIP, lingkungan pengendalian memegang peranan yang sangat penting karena akan menentukan keberlangsungan pelaksanaan keempat unsur lainnya. Efektivitas pengendalian intern dipengaruhi oleh kondisi dalam instansi, sehingga pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Oleh karena itu dalam menerapkan unsur SPIP tersebut, pimpinan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur, dan praktek detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan organisasi perangkat daerah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi



pemerintah. Adapun anggaran khusus program dan kegiatan untuk menunjang indikator sasaran ini belum tersedia seperti untuk pembentukan satgas SPIP, sosialisasi dan bimtek SPIP, evaluasi SPIP sehingga hanya includ dalam program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 8: Program dan Kegiatan untuk penunjang indikator kinerja Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Menurunnya temuan APIP dan BPK yang Bersifat Material	Persentase menurunnya temuan APIP dan BPK	88,24 %
a	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Maturitas APIP	a Meningkatnya Maturitas APIP	a Jumlah OPD yang dinilai Maturitas SPIP	10
b	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	b Tersedianya dokumen Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	b Jumlah dokumen Sistem dan prosedur yang terselesaikan	6
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>			<b>Rp. 79.365.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Indikator Sasaran 1.4 : “ Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B “**

Dengan adanya indikator ini pemerintah Kota Bima dapat mengukur sejauhmana OPD telah pertanggungjawaban kinerjanya pertahun sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah yang merupakan salah satu pilar meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adapun program dan kegiatan untuk

menunjang indikator sasaran ini terdiri dari 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 9: Program dan Kegiatan untuk penunjang indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal B.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bima	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Meningkat	29,41 %
a	Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	a Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	a Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	1
b	Reviu LAKIP	b Tersedianya Dokumen Reviu SAKIP Pemerintah Kota Bima	b Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu SAKIP	1
c	Reviu RKA	c Tersedianya Dokumen Reviu RKA Pemerintah Kota Bima	c Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu RKA	1
d	Reviu LPPD	d Tersedianya Dokumen Reviu LPPD Pemerintah Kota Bima	d Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu LPPD	1
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>			<b>Rp. 204.452.000,00</b>	<b>100,00%</b>

***Indikator Sasaran 1.5 : “ Porsentase OPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan WBK/WBBM “***

Dengan adanya indikator ini pemerintah Kota Bima khususnya Inspektorat Kota Bima dapat mengukur sejauhmana Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) oleh OPD yang melaksanakan fungsi pelayanan publik di Kota Bima. Adapun program dan kegiatan untuk menunjang indikator sasaran ini sebagai berikut:

Tabel 10: Program dan Kegiatan untuk penunjang indikator Persentase OPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan WBK/WBBM

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bima	Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Meningkat	29,41 %
a	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	a Tersedianya Dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima	a Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1
b	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	c Tersedianya Dokumen Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Bima	c Jumlah Dokumen Laporan Hasil Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Bima	2
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>			<b>Rp. 119.802.800,00</b>	<b>100,00%</b>

**Sasaran Strategis Inspektorat 2 : “ Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ”**

Untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik, yang menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam rangka mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional, yang menunjukkan langkah-langkah menuju kondisi tingkat kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif dan berkelanjutan pada tingkat kapabilitas tertentu sebelum penyelenggaraan aktivitas pengawasan intern bisa meningkat pada level berikutnya. Untuk mengukur pengawasan telah berjalan efektif dan efisien tentunya ditunjang dengan indikator yang relevan yaitu :

### *Indikator Sasaran 2.1 : “ Level Kapabilitas APIP “*

Model Peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*, yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Adapun program dan kegiatan untuk menunjang indikator sasaran ini terdiri dari 2 (dua) program dan 3 (empat) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 11: Program dan Kegiatan untuk penunjang indikator Level Kapabilitas APIP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN APIP yang diangkat dalam Jabatan fungsional setelah mendapatkan sertifikat Diklat	12,50 %
	a Pelaksanaan Penilaian AKJG	a Terlaksannya Penilaian AKJG	a Jumlah ASN yang dinilai AKJG	35
	b Pengelolaan Website dan Aplikasi	b Terkelolanya Website dengan baik	b Jumlah Website OPD dan Aplikasi Lainnya yang diisi/dikelola	10
2	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Pengendalian Pengelolaan Manajemen APIP	Jumlah Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang terpenuhi untuk Level 3	Level 3
	a Pengendalian manajemen pelaksanaan Kapabilitas APIP	a Tersedianya data- data pemenuhan komponen kapabilitas Level 3	a Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	1
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>			<b>Rp. 90.250.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Indikator Sasaran 2.2 : “ Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat”**

Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat berjalan efektif dan efisien tentunya harus ditunjang dengan ketersediaan tenaga APIP yang melakukan pengawasan dengan menitikberatkan pada kuantitas APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas tersebut sekaligus merupakan cerminan kualitas APIP yang melaksanakan fungsi pengawasan secara profesional. Adapun program dan kegiatan untuk menunjang indikator sasaran ini terdiri dari 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

Tabel 12: Program dan Kegiatan untuk penunjang indikator Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, subtasi, penjenjangan, dan profesi	66,67 %
a	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	a Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	a Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Pendidikan penjenjangan	10
b	Bimtek pengawasan Operasional	b Terlaksananya Bimtek pengawasan Operasional	b Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Bimtek pengawasan Operasional	10
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>			<b>Rp. 231.544.172,00</b>	<b>100,00%</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dalam rangka memberikan gambaran tingkat capaian target kinerja dari masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun rencana kerja tahun anggaran 2020 maka diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut pengukuran kinerja Inspektorat Kota Bima yang digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Adapun hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Bima tahun 2020 sebagai berikut :

#### **1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 pada sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yaitu meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD dan Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Nilai SAKIP.

Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD tahun 2019 dan Nilai SAKIP tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13: Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD tahun 2019 dan Nilai SAKIP Tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	
I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan yang daerah	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	
		Keterangan : Pengukuran berdasarkan opini BPK RI atas hasil pemeriksaan LKPD Kota Bima tahun 2019 yang diaudit tahun 2020				
		2. Nilai SAKIP	BB (70,01)	B (67,05)	B	
		Keterangan : Pengukuran berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima tahun 2019 oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2020.				

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 6 diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD, pengukurannya didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2019, hal ini disebabkan oleh keluarnya opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atas hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah sekitar bulan Mei setelah tahun anggaran atau tahun 2020 sehingga kinerja yang diukur adalah kinerja tahun anggaran sebelumnya dengan realisasi bersifat kualitatif yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selain daripada opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Indikator Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai AKIP yang didasarkan pada hasil evaluasi oleh Kementerian PAN-RB tahun 2019 menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil pada

Pemerintah Kota Bima menunjukkan hasil yang Baik yaitu B (67,05) walaupun **belum berhasil** mencapai target nilai BB.

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Kota Bima sebagai salah satu unsur penunjangnya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan Indek Nilai SAKIP.

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang serta gambaran perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bima tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 14: Perbandingan antara target dan realisasi kinerja, dari sasaran dan indikator kinerja sasaran yang mendukung indikator pemerintah Kota Bima dengan Indikator opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tahun anggaran 2019 pemeriksaan Tahun 2020 dan Nilai SAKIP Tahun 2020.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif , efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil	70,73%	60,98%	86,21%
<b>Keterangan :</b>					
<b>Prosentase target dihitung dengan rumus:</b> jumlah OPD yang ditargetkan untuk tahun n dibagi dengan Jumlah OPD seluruhnya di kali dengan 100%					
<b>Prosentase realisasi dihitung dengan Rumus :</b> jumlah OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang dibagi dengan Jumlah OPD seluruhnya dikali dengan 100%					
<b>Prosentase Capaian dihitung dengan Rumus :</b> porsentase OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang dibagi dengan porsentase target OPD dikali dengan 100%					
		2. Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	92,00%	71,88%	78,13%
<b>Keterangan :</b>					



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		<p><b>Prosentase target dihitung dengan rumus:</b> Target tahun awal Renstra diambil dari temuan BPK sebanyak 57 Temuan dan 107 temuan Inspektorat dari tahun 2014 s/d tahun 2018 (5 tahun) dengan rata - rata temuan BPK sebanyak 11 temuan pertahun dan Inspektorat sebanyak 21 temuan pertahun sehingga temuan BPK dan Inspektorat berjumlah sebanyak 32 temuan pertahun. Sedangkan yang dijadikan base line target yaitu temuan tahun 2018 sebanyak 34 temuan sebagai pembagi dengan pembilangnya adalah jumlah dari nilai rata-rata sebanyak 32 temuan yang dijadikan target maksimal temuan pertahun</p> <p><b>Prosentase realisasi dihitung dengan Rumus :</b> Jumlah Realisasi Tahun N dibagi Jumlah Target temuan Tahun N dikali 100%</p> <p><b>Prosentase Capaian dihitung dengan Rumus :</b> Porsentase Realisasi Tahun N dibagi dengan Porsentase Target Tahun N di Kali 100%</p>			
		3. Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Terdefinisi (3,10)	Terdefinisi (3,04)	Terdefinisi
		<b>Keterangan :</b>			
		<b>Prosentase target dihitung dengan rumus:</b> Ditentukan dengan rencana tingkat capaian pertahun			
		<b>Prosentase realisasi dihitung dengan Rumus :</b> Realisasi Tahun N			
		<b>Prosentase Capaian dihitung dengan Rumus :</b> realisasi tahun N dibagi dengan target dikali dengan 100%			
		4. Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B	82,35%	76,47%	92,86%
		<b>Keterangan</b>			
		<b>Porsentase target dihitung dengan rumus:</b> jumlah OPD yang ditargetkan untuk tahun n dibagi dengan 34 OPD di kali dengan 100%			
		<b>Porsentase realisasi dihitung dengan Rumus :</b> jumlah OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal (B) dibagi dengan target OPD menerapkan SAKIP dikali 100%			
		<b>Porsentase Capaian dihitung dengan Rumus :</b> realisasi OPD yang menerapkan SAKIP dengan nilai minimal (B) dibagi dengan target OPD SAKIP (B) dikali dengan 100%			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		5. Persentase SKPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM	20,00%	37,93%	44,00%
<b>Keterangan</b>					
<b>Porsentase target dihitung dengan rumus:</b> jumlah OPD yang ditargetkan untuk tahun n dibagi dengan Jumlah SKPD seluruhnya di kali dengan 100%					
<b>Porsentase realisasi dihitung dengan Rumus :</b> jumlah OPD yang ditetapkan memiliki/mendapatkan WBK/WBBM dibagi dengan target OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM dikali 100%					
<b>Porsentase Capaian dihitung dengan Rumus :</b> realisasi OPD yang ditetapkan memiliki/mendapatkan WBK/WBBM dibagi dengan jumlah total OPD dikali dengan 100%					
2	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1. Level Kapabilitas APIP	Level 3 (terdefinisi)	Level 3 (terdefinisi)	Level 3 (terdefinisi)
<b>Keterangan :</b>					
<b>Prosentase target dihitung dengan rumus:</b> Ditentukan dengan rencana tingkat capaian pertahun					
<b>Prosentase realisasi dihitung dengan Rumus :</b> Realisasi Tahun N					
<b>Prosentase Capaian dihitung dengan Rumus :</b> realisasi tahun N dibagi dibagi dengan target dikali dengan 100%					
		2. Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat	35 Orang	35 Orang	100 %
<b>Keterangan :</b>					
<b>Prosentase target dihitung dengan rumus:</b> jumlah ASN yang ditargetkan untuk Peningkatan Kapasitas tahun n dibagi dengan Jumlah ASN seluruhnya di kali dengan 100%					
<b>Prosentase realisasi dihitung dengan Rumus :</b> jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas dibagi dengan target ASN dikali 100%					
<b>Prosentase Capaian dihitung dengan Rumus :</b> realisasi ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas dibagi dibagi dengan jumlah total ASN dikali dengan 100%					

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 14 diatas menunjukkan bahwa :

**1. Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah**

1.1. Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil menunjukkan bahwa dari OPD yang ditargetkan yang tidak mendapatkan temuan bersifat materiil sebesar 70,73% atau sebanyak 29 OPD dari total OPD sebanyak 41 OPD. Dari target tersebut maka terealisasi sebanyak 25 OPD yang tidak mendapatkan temuan berulang atau sebesar 60,98% atau dengan capaian sebesar 86,21% hal tersebut menunjukkan tercapainya target yang diinginkan.

1.2. Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK. Target sebesar 92,00% atau sebanyak 32 Temuan dari Total temuan tahun 2018 sebagai base line data sebanyak 34. Dari target tersebut tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK Terealisasi sebanyak 23 temuan atau 71,88% dari target 32 temuan atau dengan capain sebesar 78,13% dari target yang ditentukan sebesar 92,00% atau **belum** tercapainya target yang diinginkan.

1.3 Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima. Dari Target Level/Nilai hasil Quality Assurance Level

3/terdefinisi (3,10) pada tahun 2020 terealisasi dengan Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima tahun 2020 adalah Level 3/terdefinisi (3,04) atau tercapai sebesar 98,06%. hal tersebut menunjukkan tercapainya target.

- 1.4 Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal B, target sebesar 82,35 % atau sebanyak 28 OPD dari Total 34 OPD (OPD yang di evaluasi karena adanya perubahan Struktur Organisasi sehingga yang diukur hanya pada OPD awal dan tanpa OPD Kecamatan) dengan realisasi sebesar 76,47% atau OPD yang telah menerapkan SAKIP dengan Nilai Minimal B sebanyak 26 OPD atau dengan capaian sebesar 92,86 % dari target yang telah ditentukan.
- 1.5 Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Persentase OPD yang dibangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dengan indikator Jumlah OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM, untuk tahun 2020 ditargetkan sebesar 20,21% belum dilaksanakan penilaian yang disebabkan oleh belum adanya penetapan terhadap OPD yang akan dinilai. Oleh karena itu data yang ditampilkan untuk tahun 2020 adalah data hasil penilaian tahun 2016 dengan target 38 % atau sebanyak 11 OPD dari 29 OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kota Bima dengan realisasi data tahun 2016 sebesar 37,93% dengan capaian untuk tahun 2019 base line data 2016 sebesar 44,00%

**2. Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

2.1 Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan indikator Level kapabilitas APIP, target Level 3 (3,10) atau terdefinisi. Hasil peningkatan kapabilitas menunjukkan realisasi sebesar 100 % atau terealisasi pada tingkat Level 3 (3,04) atau dari target Level 3 (3,10) dengan capaian sebesar 100 % (terdefinisi) dari target yang ditentukan atau sudah mencapai target.

2.2. Sasaran Strategis Inspektorat meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan indikator Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat, target sebesar 80,00 % atau sebanyak 3 orang pertahun dan untuk tahun 2020 diharapkan sebanyak sebanyak 35 orang dari 41 orang dari tahun 2018. Hasil peningkatan kapabilitas berupa pendidikan formal (penjenjangan, inpassing dan pembentukan) menunjukkan realisasi sebesar 100 % atau terealisasi sebanyak 35 orang dari target 41 orang dengan capaian sebesar 100 % dari target yang ditentukan sebesar 80% atau sudah mencapai target.

**2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.**

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir pada sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta dengan indikator Kinerja pendukung Inspektorat Kota Bima, sebagai berikut :

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD

Perkembangan Opini BPK RI atas pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Bima 5 tahun terakhir dapat dilihat pada matriks berikut:

Tabel 15 : Perbandingan Realisasi dan capaian opini BPK

Tahun audit	Indikator Kinerja Opini BPK RI terhadap LKPD	
	Realisasi	Capaian
2016 atas LKPD 2015	WTP	WTP
2017 atas LKPD 2016	WTP	WTP
2018 atas LKPD 2017	WTP	WTP
2019 atas LKPD 2018	WTP	WTP
2020 atas LKPD 2019	WTP	WTP

Dari tabel diatas terlihat bahwa status atas opini BPK RI atas LKPD Kota Bima dari tahun ke tahun dimana sampai dengan tahun 2020 status opini WTP tetap dipertahankan.

b. Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP

Peningkatan hasil evaluasi dari KEMENPAN-RB atas AKIP Pemerintah Kota Bima 5 tahun terakhir dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel 16 : Perbandingan Realisasi dan capaian Nilai SAKIP

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	4	6
2014	B	CC	CC
2015	B	B	B
2016	BB	B	B
2017	BB	B	B
2018	BB	B	B
2019	BB	B	B

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi tren Peningkatan hasil evaluasi dari KEMENPAN-RB atas AKIP Pemerintah Kota Bima dimana sampai dengan tahun 2019 capaian hasil evaluasi dengan nilai SAKIP : B.

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Kota Bima sebagai

salah satu unsur penunjangnya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dan Nilai SAKIP (B).

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang serta gambaran perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bima dapat dijelaskan dibawah ini.

**a. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**

- 1). Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil.

Tabel 17 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil tahun 2014 dan 2019.

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4
2014	9,76%	8,81%	90,24%
2015	24,29%	23,20%	95,12%
2016	36,59%	16,96%	46,34%
2017	60,98%	38,70%	63,41%
2018	85,37%	60,01%	70,28%
2019	60,98%	46,34%	76,00%
2020	70,73%	60,98%	86,21%

Sumber data OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil dari tahun 2011, 2012, 2013 sebagai base line data untuk tahun 2014, begitu dengan tahun – tahun berikutnya dengan kriteria atas beberapa materi kerugian antara lain : temuan : SPPD, Honorarium dan Belanja Modal. Dari tabel 17 diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertahun terjadi peningkatan OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil, mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 terjadi penurunan kembali bila dibandingkan dengan tahun 2015 terhadap OPD yang tidak

mendapat temuan bersifat materil yaitu capaian 46,34% dari target 36,59% sedangkan pada tahun 2017 capaian 63,41% dari target sebesar 60,98%.atau penurunan atas OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil sebesar 17,07%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali sebesar 6,86%, penurunan sebesar 1,99% pada tahun 2019 dan peningkatan kembali pada tahun 2020 sebesar 10,00%. Hal ini menunjukkan belum stabilnya capaian terhadap OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil dari target yang ditentukan.

- 2). Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK.

Tabel 18 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Porsentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK

TAHUN	JUMLAH TEMUAN				JUMLAH TINDAKLANJUT			REALISASI PERTAHAUN	CAPAIAN PERTAHAUN
	BPK	INSPEKTORAT	JUMLAH	PERSENTASE TARGET	BPK	INSPEKTORAT	JUMLAH		
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/5X100 %)
2020	11	21	32	92,00%	10	13	23	71,88%	78,13%
2019	11	21	32	90,00%	11	10	21	65,63%	72,92%
2018	12	22	34	90,00%	8	13	21	61,76%	68,63%
2017	22	42	64	90,00%	22	30	52	81,25%	90,28%

Dari tabel data sebagaimana tertera diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan porsentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Temuan tahun 2018 dijadikan baseline target yaitu sebanyak 34 temuan, adapun jumlah temuan APIP dan BPK tahun 2020 adalah sebanyak 32 temuan atau 92,00% dan tindaklanjut atas temuan tersebut terealisasi sebanyak 23 temuan atau 71,88%



sehingga capaian akhir tahun 2020 sebesar 78,13%. Dari hasil data tersebut diatas menunjukkan adanya peningkatan pertahun.

- 3). Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima.

Tabel 19 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima.

TAHUN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
	TINGKAT	ANGKA	TINGKAT	ANGKA	TINGKAT	%
2018	Berkembang	2,80	Berkembang	2,35	Berkembang	83,93%
2019	Berkembang	2,80	Berkembang	2,40	Berkembang	85,71%
2020	Terdefinisi	3,10	Terdefinisi	3,04	Terdefinisi	98,06%

Untuk data perbandingan tahun sebelumnya belum bisa disajikan disebabkan oleh sasaran dan indikator ini baru tertuang dalam renstra tahun 2018 sehingga data yang bisa disajikan hanya tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan capaian hasil 98,06% atau telah mencapai target atau Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima tahun 2019 dengan Level/Nilai hasil Quality Assurance adalah Level 3/terdefinisi (3,04).

- 4). Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal B

Tabel 20 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal B.

TAHUN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN
	%	ANGKA	%	ANGKA	%
2014	62,07%	18	62,07%	18	100%
2015	68,97%	20	68,97%	20	100%
2016	75,86%	22	75,86%	22	100%
2017	82,76%	24	82,76%	24	100%
2018	93,10%	29	100,00%	29	100%
2019	82,35%	28	76,47%	26	92,86%

Dari uraian perkembangan persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B tahun 2014 dan 2019 menunjukkan bahwa penerapan SAKIP untuk OPD dilingkungan Pemerintah Kota Bima telah mencapai target pertahun. Hal tersebut tercermin dari capaian yang dihasilkan oleh OPD yang ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan pemerintah daerah memperoleh hasil Indeks SAKIP dengan nilai baik untuk tahun 2019 penilaian tahun 2020 walaupun **belum berhasil** memperoleh target Nilai SAKIP BB.

- 5). Meningkatkan kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Persentase OPD yang dibangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Tabel 21 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Persentase OPD yang dibangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

OPD SAMPLING PERTAHUN					
TAHUN	TARGET	%	REALISASI	%	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
2016	11	37,93	11	100	37,93

Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dengan indikator Jumlah OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM, untuk tahun 2020 ditargetkan sebesar 20,00% belum dilaksanakan penilaian yang disebabkan oleh belum adanya penetapan terhadap OPD yang akan dinilai. Oleh karena itu data yang ditampilkan untuk tahun 2020 adalah data hasil penilaian tahun 2016 dengan target 37,93 % atau sebanyak 11 OPD dari 29 OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kota Bima dengan realisasi data tahun 2016 sebesar 100,00% dengan capaian untuk tahun 2020 base line data 2016 sebesar 37,93%.

**b. Sasaran Strategis Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**

- 1). Sasaran Strategis Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan indikator Level Kapabilitas APIP

Tabel 22 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Level Kapabilitas APIP

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	TINGKAT	TINGKAT	
2018	Level 3	Berkembang	Level 3
2019	Level 3	Berkembang	Level 3
2020	Level 3	Terdefinisi	Level 3

Untuk data perbandingan tahun sebelumnya belum bisa disajikan disebabkan oleh sasaran dan indikator ini baru tertuang dalam renstra tahun 2018 sehingga data yang bisa

disajikan hanya tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan capaian hasil terdefinisi (Level 3) atau telah mencapai target.

- 2). Sasaran Strategis Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan indikator Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas.

Tabel 23 : Perbandingan antara target dan realisasi kinerja indikator Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas sampai dengan tahun 2020.

40 ORANG TENAGA FUNGSIONAL YAG DIBUTUHKAN S/D TAHUN 2018								
TAHUN	TARGET	%	REALISASI		%	CAPAIAN	TARGET ORANG	
1	2	3	4		5	6	7	
2016/25	25							
2016	27	67,50%	2	25+2	27	100,00%	67,50%	40
2017	29	72,50%	2	27+2	29	100,00%	72,50%	40
2018	31	77,50%	2	29+2	31	100,00%	77,50%	40
41 ORANG TENAGA FUNGSIONAL YAG DIBUTUHKAN S/D TAHUN 2023								
BASE 2018 (baru)	31	75,61%						
2019	33	80,49%	2	31+2	33	100,00%	80,49%	41
2020	35	85,37%	2	33+2	35	100,00%	85,37%	41
2021	37	90,24%						
2022	39	95,12%						
2023	41	100,00%						

Dari tabel data sebagaimana tertera diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan diklat tenaga fungsional sebanyak 41 orang dengan asumsi kebutuhan pertahun 2 orang dari base line data tenaga tahun 2016 sebanyak 25 orang sehingga capaian akhir tahun 2020 sebesar 100,00%. Adapun kebutuhan diklat yang menjadi target adalah diklat pembentukan, penjenjangan, dan Inpasing. Dari hasil data tersebut diatas menunjukkan adanya peningkatan pertahun.

**3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra.**

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah sasaran strategis pemerintah Kota Bima yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Bima yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima untuk menunjang sasaran Strategis serta indikator kinerja pemerintah Kota Bima dapat digambarkan dengan persentase capaian dari total target dalam rencana strategis. Gambaran capaian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja pemerintah Kota Bima yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Tabel 24: Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah Indikator Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja	s/d Tahun 2020			Akhir Renstra 2020
		Target	Realisasi	Capaian	Target
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP

Dari realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 telah meraih WTP dari target yang ditentukan sampai dengan tahun 2020 yaitu WTP.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Kota Bima sebagai salah satu unsur

penunjangnya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang serta gambaran Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020 dapat lihat pada matrik sebagai berikut.

1) Sasaran Strategis Inspektorat 1 : Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah Akhir Renstra 2020 dengan indikator Kinerja :

a) Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil

Tabel 25 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2020			Tahun 2019
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat material	70,73%	60,98%	86,21%	70,73%

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 25 diatas menunjukkan bahwa dari jumlah OPD yang ditargetkan sebanyak 29 OPD atau sebesar 70,73% dari total sebanyak 41 Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil untuk tahun 2020 maka terealisasi sebanyak 26 OPD atau sebesar 60,98% dengan capaian sebesar 86,21%. hal tersebut menunjukkan tercapainya target.

- b) Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK

Tabel 26 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2020			Tahun 2020
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
1. Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	92,00%	71,88%	78,13%	92,00%

penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 26 diatas menunjukkan bahwa dari Target sebesar 92,00% atau sebanyak 32 Temuan dari Total temuan tahun 2018 sebagai base line data sebanyak 34. Dari target tersebut tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK Tahun 2020 Terealisasi sebanyak 23 temuan atau 71,88% dari target 32 temuan atau dengan capain sebesar 78,13% dari target yang ditentukan sebesar 92,00% atau belum tercapainya target yang diinginkan.

- c) Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima

Tabel 27 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2020			Tahun 2020
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
1. Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	terdefinisi (3,10)	terdefinisi (3,04)	Terdefinisi (98,06)	terdefinisi (3,10)

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 27 diatas menunjukkan bahwa dari Target Level/Nilai hasil Quality Assurance Level 3/terdefinisi (3,10) pada tahun 2020 terealisasi dengan Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima tahun 2019 adalah Level 3/terdefinisi (3,04) atau tercapai sebesar 98,06%. hal tersebut menunjukkan tercapainya target.

- b. Indikator Kinerja Pemerintah Kota Bima yaitu Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP.

Tabel 28: Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah Indikator Kinerja Indeks SAKIP/LKIP.

Sasaran Strategis pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja	s/d Tahun 2020			Tahun 2020
		Target	Realisasi	Capaian	Target
2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan	2 Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah /Nilai SAKIP	BB	B	B	BB



Sasaran Strategis pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja	s/d Tahun 2020			Tahun 2020
		Target	Realisasi	Capaian	Target
2	3	4	5	6	7
pemerintahan daerah					

Untuk tahun 2020 capaian Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP belum mencapai target.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Kota Bima sebagai salah satu unsur penunjangnya untuk mencapai Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah ditargetkan.

Adapun beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang serta gambaran Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2019 dapat lihat pada matrik sebagai berikut.

1) Sasaran Strategis Inspektorat 1 : Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah Akhir Renstra 2020 dengan indikator Kinerja :

a) Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal B

Tabel 29 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2020			Tahun 2020
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
1. Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal B	82,35%	76,47%	92,86%	82,35%

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 29 diatas menunjukkan bahwa dari target sebesar 82,35 % atau sebanyak 28 OPD dari Total 34 OPD (OPD yang di evaluasi karena adanya perubahan Struktur Organisasi sehingga yang diukur hanya pada OPD awal dan tanpa OPD Kecamatan) dengan realisasi sebesar 76,47% atau OPD yang telah menerapkan SAKIP dengan Nilai Minimal B sebanyak 26 OPD atau dengan capaian sebesar 92,86% dari target yang telah ditentukan.

- b) Persentase OPD yang dibangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Tabel 30 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2020			Tahun 2020
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
1. Persentase OPD yang dibangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih	20,00%	37,93 % 2016	44,00 % 2016/2018	20,00%

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2020			Tahun 2020
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
dan Melayani (WBK/WBBM)				

indikator Jumlah OPD yang memiliki/mendapatkan WBK/WBBM, untuk tahun 2020 belum dilaksanakan penilaian yang disebabkan oleh belum adanya penetapan terhadap OPD yang akan dinilai. Oleh karena itu data yang ditampilkan untuk tahun 2020 adalah data hasil penilaian tahun 2016 atau sebanyak 11 OPD dari 29 OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kota Bima dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 37,93 dengan hasil Zona kepatuhan pada posisi hijau atau nilai sebesar 89,43 dengan asumsi telah mencapai target.

- 2). Sasaran Strategis Inspektorat 2 : Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah Akhir Renstra 2020 dengan indikator Kinerja :

- a). Level Kapabilitas APIP

Tabel 31 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2020			Tahun 2020
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
2. Level Kapabilitas APIP	Level 3 terdefinisi (3,10)	Level terdefinisi (3,04)	Level 3 Terdefinisi	Level 3 terdefinisi (3,10)

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 31 diatas menunjukkan bahwa dari target Level 3 (3,10) atau terdefinisi. Hasil peningkatan kapabilitas menunjukkan realisasi sebesar 100 % atau terealisasi pada tingkat Level 3 (3,04) atau dari target Level 3 (3,10) dengan capaian sebesar 100 % (terdefinisi) dari target yang ditentukan atau sudah mencapai target.

- b). Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat

Tabel 32 : Perbandingan antara realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah tahun 2020

Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Sampai Dengan Tahun 2020			Tahun 2020
	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3	4	5
2. Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat	35 orang	35 orang	100%	35 orang

Pada tahun 2020 Porsentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas target sebanyak 85,37 % atau sebanyak 35 orang dari 41 orang yang dibutuhkan sampai dengan Tahun 2023. Untuk tahun 2020 diharapkan sebanyak sebanyak 35 orang dari 41 orang mulai dari tahun 2018. Hasil peningkatan kapabilitas berupa pendidikan formal (penjenjangan, inpasing dan pembentukan) menunjukkan realisasi sebesar 100 % atau terealisasi sebanyak 35 orang dengan capaian sebesar 100 % dari target yang ditentukan sebanyak 35 orang atau sudah mencapai target.

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Faktor Keberhasilan adalah faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi dan misi. Capaian Kinerja diartikan sebagai hasil yang diperoleh dengan membandingkan antara Realisasi, Capaian dan Target. Sehingga faktor keberhasilan capaian kinerja dapat disimpulkan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk meraih target-target yang telah ditetapkan, sehingga realisasi dari program kegiatan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Inspektorat Kota Bima dapat memilah capaian kinerja menjadi 2 bagian yaitu indikator yang berhasil dalam capaian kinerja dan indikator yang belum berhasil dalam capaiannya dari sasaran kinerja Pemerintah Kota Bima yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sasaran serta indikator kinerja utama Inspektorat Kota Bima untuk menunjang sasaran kinerja serta indikator kinerja utama pemerintah Kota Bima seperti dalam tabel berikut:

- a. Indikator Kinerja pemerintah Kota Bima yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD.

Tabel 33: Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI Terhadap LKPD tahun 2019.

No	Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	
I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI	WTP	WTP	WTP	Berhasil

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 33 diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Opini Badan Pemeriksa

Keuangan RI tahun anggaran 2019 pemeriksaan tahun 2020 telah berhasil mencapai target.

**Berikut ini dapat dijelaskan faktor keberhasilan dari indikator kinerja ini :**

Sebagai tolak ukur capaian kinerja tahun 2020 atas Opini BPK RI diambil dari hasil opini BPK RI tahun anggaran 2019. Adapun gambaran Opini yang dicapai selama 5 tahun seperti yang tertuang dalam tabel 15. Dari tabel diatas terlihat bahwa dari Tahun 2015, Pemerintah Kota Bima telah mampu menerapkan Prinsip akuntansi dalam laporan keuangan secara konsisten sehingga bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Bima mulai melakukan perubahan berupa perbaikan terhadap penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan opini dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Upaya perbaikan terhadap penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh pemerintah daerah terutama atas pengelolaan aset daerah, sampai akhirnya pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bima mampu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun anggaran 2014 dan mampu dipertahankan sampai dengan tahun 2020 atas LKPD tahun anggaran 2019.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari dukungan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang Inspektorat Kota Bima. Adapun gambaran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bima tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 34 : Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja utama Inspektorat Kota Bima dalam mendukung indikator utama pemerintah Kota Bima yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat material	70,73%	60,98%	86,21%	Berhasil
		2. Persentase tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	92,00%	71,88%	78,13%	Belum Berhasil
		3. Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Terdefinisi (3,10)	Terdefinisi (3,04)	Terdefinisi	Berhasil

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 34 diatas dapat dijelaskan faktor –faktor keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target dari indikator kinerja sasaran strategis inspektorat Kota Bima sebagai berikut :

**1) Analisis Keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja utama dari sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.**

**1.1. Indikator kinerja persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat material.**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam tabel perbandingan diatas, baik perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada tahun 2020 maupun perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada tahun 2019 dengan tahun-tahun sebelumnya dan terget tahun 2020 dapat dijelaskan bahwa Sumber data OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil dari tahun 2011, 2012, 2013 sebagai base line data untuk tahun 2014, begitu

dengan tahun – tahun berikutnya dengan kriteria atas beberapa materi kerugian antara lain : temuan : SPPD, Honorarium dan Belanja Modal. Dari tabel 17 diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertahun terjadi peningkatan OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil, mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 terjadi penurunan kembali bila dibandingkan dengan tahun 2015 terhadap OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil yaitu capaian 46,34% dari target 36,59% sedangkan pada tahun 2017 capaian 63,41% dari target sebesar 60,98%.atau penurunan atas OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil sebesar 17,07%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali sebesar 6,86%, penurunan sebesar 1,99% pada tahun 2019 dan peningkatan kembali pada tahun 2020 sebesar 10,00%. Hal ini menunjukkan belum stabilnya capaian terhadap OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materil dari target yang ditentukan.

Keberhasilan pelampauan dari target tersebut tidak terlepas dari peran Inspektorat Kota Bima dalam melakukan quality ansurance berupa melakukan fungsi kunsultasi dengan OPD baik mulai perencanaan sampai dengan peng SPJ an yang disebabkan oleh tersedianya anggaran khusus atas fungsi asistensi, disamping hal tersebut penyebab lainnya adalah Kooordinasi dan komunikasi antara Auditi dan Auditor, kompetensi pengelola keuangan OPD, kompetensi pemeriksa dalam pengembangan temuan, integritas dan etika aparatur pengelola keuangan, serta adanya perubahan pola pemeriksaan pada objek pemeriksaan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dan pemanfaatan anggaran, adanya perubahan peraturan – peraturan



yang diikuti dengan pembuatan dan kepatuhan atas regulasi tersebut.

1.2. *Indikator Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK*

Komitmen pemerintah daerah akan peran dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bima dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari komitmen pimpinan, komitmen pegawai sekaligus tim teknis TLHP dalam mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas jalannya organisasi dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bima. Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh Inspektorat (internal auditor) salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Banyaknya temuan audit yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditi untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh APIP. Penyelesaian TLHP yang merupakan perwujudan kinerja Inspektorat Daerah Kota Bima tercermin dalam data pemantauan tindak lanjut tahun 2017 sampai dengan bulan Desember TA 2020. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa tindak lanjut yang dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi sebanyak 94 rekomendasi atau 72,31 % dari 130 rekomendasi, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak 36 rekomendasi atau sebesar 8.63 %, serta rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi atau sebesar 0 %. Jika dilihat *progress* TLHP tahun 2020 sebanyak 23 rekomendasi atau 71,88 % dari target sebanyak 32 rekomendasi atau 92,00% dengan capaian sebesar 78,13% ini mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target yang ditentukan. Upaya tindak lanjut belum maksimal dilakukan, terlihat masih adanya

rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, dan keterlambatan penyelesaian tindak lanjut (tidak tepat waktu) serta respon pejabat yang diperiksa atau pejabat yang bertanggung jawab dalam hal tindak lanjut masih kurang. Dari gambaran tersebut diatas dapat dikatakan belum optimalnya dukungan/keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan TLHP sebagai wujud akuntabilitas.

1.3. *indikator Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima*

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern adalah tingkat kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi atau Pengendalian telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sesuai dengan pedoman BPKP, merincikan level maturitas SPIP menjadi enam tingkatan sebagai berikut:

Level	Keterangan	Interval Skor
Belum ada	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian intern.	Kurang dari 1,0 ( $0 < \text{skor} < 1,0$ )
Rintisan	Praktik pengendalian intern bersifat ad hoc dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan.	1,0 s/d kurang dari 2,0 ( $1,0 \leq \text{skor} < 2,0$ )
Berkembang	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektivitasnya.	2,0 s/d kurang dari 3,0 ( $2,0 \leq \text{skor} < 3,0$ )
Terdefinisi	Praktik pengendalian telah	3,0 s/d kurang dari 4,0

	terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai.	(3,0≤skor<4,0)
Terkelola dan terukur	Pengendalian intern diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi.	4,0s/dkurangdari4,5 (4,0≤skor<4,5)
Optimum	Pengendalian intern diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis.	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5≤skor≤5)

Pada tahun 2020 indikator Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima. Dari Target Level/Nilai hasil Quality Assurance *terdefinisi (3,10)* terealisasi *terdefinisi (3,04)* atau tercapai sebesar 98,06%. hal tersebut menunjukkan tercapainya target.

*Keberhasilan pencapaian target ini* lebih disebabkan oleh beberapa faktor baik internal OPD maupun dari Inspektorat sendiri. Salah satu fungsi Inspektorat Kota Bima adalah melakukan koordinasi dan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan SPIP dimana didalamnya terdapat lingkungan pengendalian sebagai salah satu unsur SPIP. beberapa faktor internal OPD antara lain tersedia petunjuk teknis dan atau Standar operasional prosedur atas program dan kegiatan, semakin membaiknya penerapan dari Standar operasional prosedur atas program dan kegiatan yang telah ada, semakin menguatnya penerapan penegakan integritas dan nilai etika, semakin kuatnya komitmen pada kompetensi terlebih pada tahun 2020 atas penyelenggaraan SPIP sehingga berpengaruh pada tercapainya indikator kinerja ini.

- b. Indikator Kinerja pemerintah Kota Bima yaitu Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP.

Tabel 35: Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP.

No	Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	
I	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	2   Nilai SAKIP	BB	B	B	Belum berhasil

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 35 diatas menunjukkan bahwa Indikator kinerja Indeks SAKIP/ Nilai SAKIP, pengukurannya didasarkan pada capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2019, hal ini disebabkan oleh hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 dilakukan pada bulan desember tahun 2019 dan diterima oleh Pemerintah Kota Bima pada Bulan Februari 2020 sehingga kinerja yang diukur adalah kinerja tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil pengukuran tersebut terlihat bahwa Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Nilai SAKIP belum mencapai target yang telah ditentukan.

**Berikut ini dapat dijelaskan faktor *belum berhasil*-nya dari indikator kinerja ini :**

Indikator sasaran ini diarahkan untuk mendukung penginformasian pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah pertahunnya sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah yang merupakan salah satu pilar terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Gambaran peningkatan capaian Indeks Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP selama 3 tahun terakhir seperti yang tertuang dalam tabel 20 diatas tidak terlepas dari mulai penerapan SAKIP belum sepenuhnya menggambarkan efektifitas penggunaan anggaran bila dikaitkan dengan kinerja yang diharapkan terutama terkait dengan definisi kinerja pada perumusan sasaran strategis, kualitas indikator kinerja serta kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta adanya salah satu syarat yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi dari MENPAN-RB bahwa untuk mendapatkan Nilai BB adalah jumlah OPD yang bernilai minimal BB yakni sebanyak 20 (dua puluh) OPD. Hal ini belum terpenuhi, karena dari 29 (dua puluh sembilan) OPD yang dievaluasi hanya terdapat sebanyak 7 (tujuh) OPD yang mendapatkan Nilai BB (70-80), sedangkan sebanyak 20 (dua puluh) OPD mendapatkan Nilai B (60-70) dan 2 (dua) OPD mendapatkan Nilai CC (50-60).

Pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Bima tentunya tidak terlepas dari dukungan beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja penunjang Inspektorat Kota Bima. Adapun gambaran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Inspektorat Kota Bima tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 36 : Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja utama Inspektorat Kota Bima dalam mendukung indikator utama pemerintah Kota Bima yaitu Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Inspektorat	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B	82,35%	76,47%	92,86%	Belum Berhasil
		2. Persentase SKPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM	20,00%	37,93%	44,00%	Belum Berhasil

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 36 di atas dapat dijelaskan faktor –faktor kegagalan dalam pencapaian target dari indikator kinerja sasaran strategis inspektorat Kota Bima sebagai berikut :

**1) Analisis Keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja utama dari sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.**

1.4. *Indikator Persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal B.*

Indikator ini berguna untuk dapat mengukur sejauhmana OPD telah pertanggungjawaban kinerjanya pertahun sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi OPD. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 penerapan SAKIP oleh OPD telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik, hal tersebut tercermin dengan telah tercapainya target yang ditentukan dalam pengukuran persentase OPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal B dimana pada 2014 capaian untuk indikator ini sebanyak 18 OPD atau 62,07 % dari total OPD

dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 62,07 % demikian pula pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 capaian tersebut mampu dipertahankan sebesar target keberhasilan yang ditentukan. Pada tahun 2019 terdapat realisasi 76,47% OPD atau capaian sebesar 92,86,% dengan target 28 OPD dari total sebanyak 34 OPD dengan rata capaian dengan nilai B. Belum berhasilnya capaian kinerja ini tentunya tidak terlepas dari belum optimalnya peran seluruh unsur untuk menciptakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dijelaskan atas capaian kinerja pemerintah daerah yang belum memenuhi target yang telah ditentukan diatas hal tersebut antara lain karena belum terlaksananya perbaikan terhadap item - item penilaian oleh beberapa OPD terkait perencanaan kinerja yang baik hasil dari asistensi, koordinasi, dan pembinaan serta reviu atas dokumen perencanaan oleh Bappeda, Bagian OPA Setda Kota Bima dan Inspektorat sehingga dapat menyajikan tujuan, sasaran, indikator dan target - target yang dapat diukur, baik dalam dokumen RPJMD, Renstra, Renja sampai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, dengan mulai membaiknya perencanaan tentunya berpengaruh terhadap membaiknya pemenuhan, dan pemanfaatan laporan kinerja yang lebih terarah sehingga program dan kegiatan serta penyerapan yang menunjang sasaran dan indikator kinerja dapat diukur, dengan demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya OPD dapat dipertanggung jawabkan.

1.5. *Indikator Persentase OPD yang dibangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)*

untuk tahun 2020 belum dilaksanakan penilaian yang disebabkan oleh belum adanya penetapan terhadap OPD yang akan dinilai. Oleh karena itu pada tahun 2020 ini data yang dijadikan ukuran keberhasilan kinerja adalah capaian kinerja hasil penilaian tahun 2016 dengan target 37,93 % atau sebanyak 11 OPD dari 29 OPD yang ada dilingkungan pemerintah Kota Bima dengan realisasi sebesar 100% atau tercapai 37,93 % dengan hasil Zona kepatuhan pada posisi hijau atau nilai sebesar 89,43. Sedangkan untuk target tahun 2020 sendiri adalah sebesar 20,00% yang menerapkan WBK/WBBM dengan realisasi data tahun 2016 sebesar 37,93% dengan capaian untuk tahun 2019 base line data tahun 2016 sebesar 44%. Dari data tersebut diatas indikator kinerja ini belum mencapai target yang diharapkan. Adapun faktor belum berhasilnya pencapaian target ini antara lain belum membaiknya penerapan manajemen perubahan dalam organisasi pemerintahan khususnya OPD, belum optimalnya penataan tatalaksana organisasi pemerintahan khususnya OPD koordinatif, belum optimalnya penataan sistem manajemen sumber daya manusia pada pemerintah daerah, belum optimalnya Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan pengawasan serta belum optimalnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh OPD yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas.



Tabel 37 : Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja utama Inspektorat Kota Bima dalam mendukung indikator utama pemerintah Kota Bima yaitu Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ Nilai SAKIP.

No	Sasaran Strategis Inspektorat	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3			4	
1.	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1 Level Kapabilitas APIP	Level 3 (terdefinisi)	Level 3 (terdefinisi)	Level 3 (terdefinisi)	Berhasil
		2 Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat	35 orang	35 orang	100 %	Berhasil

Dari penyajian data sebagaimana terlihat pada tabel 37 diatas dapat dijelaskan faktor –faktor keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target dari indikator kinerja sasaran strategis inspektorat Kota Bima sebagai berikut :

**2). Analisis Keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja utama dari sasaran strategis Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).**

**2.1. Level Kapabilitas APIP.**

Salah satu alat yang dapat dipakai untuk mengukur efektivitas peran unit audit intern di sektor publik adalah model penilaian yang disebut Internal Audit Capability Model (IA-CM) atau model kapabilitas audit intern. Kapabilitas audit intern umumnya terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

Level kapabilitas unit audit intern adalah sebagai berikut : (1) initial; (2) infrastructure; (3) integrated; (4) managed; dan (5) optimizing. Setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern pada level tersebut.

Dengan meningkatnya ukuran atau kompleksitas organisasi atau risiko terkait dengan kegiatan, maka membutuhkan kapabilitas audit intern yang lebih baik lagi. Pada masing-masing level kapabilitas di atas terdapat enam elemen audit intern, yaitu (1) peran dan layanan audit intern, (2) manajemen SDM, (3) praktik profesional, (4) manajemen kinerja dan akuntabilitas, (5) hubungan dan budaya organisasi, dan (6) struktur tata kelola. Elemen (1) sampai dengan (4) merupakan area peningkatan yang sepenuhnya bergantung pada upaya dari aktivitas audit intern sendiri untuk mewujudkannya. Sedangkan elemen (5) dan (6) juga mencakup hubungan aktivitas audit intern dengan organisasi yang didukungnya serta dengan lingkungan internal dan eksternal.

Pada tahun 2020 indikator Level Kapabilitas APIP target Level 3 atau terdefinisi, hasil peningkatan kapabilitas menunjukkan realisasi sebesar 100 % atau terealisasi pada tingkat Level 3 (terdefinisi) atau dari target Level 3 (terdefinisi) dengan capaian sebesar 100 % (terdefinisi) dari target yang ditentukan atau sudah mencapai target.

Keberhasilan capaian kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran seluruh unsur, serta terpenuhinya standar level kapabilitas sesuai dengan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern yaitu

- Kebijakan, proses, dan prosedur audit intern telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi.
- Manajemen serta praktik profesional unit audit intern telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan audit intern.

- Unit audit intern mulai menyelaraskan dengan tata kelola dan risiko yang dihadapi organisasi.
- Unit audit intern berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko.
- Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan audit intern, independensi serta objektivitas.
- Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan standar audit.

2.2. *Indikator Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat.*

Indikator kinerja ini merupakan salah satu indikator kinerja penting karena merupakan cerminan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia Inspektorat Kota Bima dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Perlu dijelaskan bahwa sebelum tahun 2013 belum terdapat tenaga fungsional auditor dan P2UPD pada Inspektorat Kota Bima, baru pada tahun 2013 dibuka inspassing oleh pemerintah pusat sehingga pada tahun 2013 jumlah auditor sebanyak 20 (dua puluh) orang (base data) diangkat dalam jabatan fungsional. Walaupun tenaga fungsional telah diangkat dalam jabatan fungsional namun belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik teknis fungsional dan penjenjangan secara memadai. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mulai adanya peningkatan kapabilitas melalui optimalisasi kerjasama dalam bentuk peningkatan kapabilitas APIP dengan BPKP selaku pembina APIP di daerah. Sehingga secara kualitas mulai terjadi peningkatan, hal tersebut ditunjukkan

dengan mulai meningkatnya tenaga fungsional yang memiliki sertifikat keahlian, penjenjangan. Walaupun secara kuantitas tenaga fungsional masih tertabas dimana sampai dengan tahun 2020 baru sebanyak 36 orang dari target yang diharapkan terpenuhi sampai dengan akhir masa renstra sejumlah 44 orang tenaga fungsional. hal tersebut disebabkan karena adanya mutasi dari jabatan fungsional kejabatan struktural, meninggal dunia, terbatasnya rekrutmen oleh pemerintah daerah, masih kurangnya minat ASN lain untuk menduduki jabatan fungsional, kurangnya penghargaan dan pengembangan karir yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada tenaga fungsional Inspektorat, lebih lanjut hal lainnya adalah terbatasnya anggaran diklat bagi yang telah menduduki jabatan fungsional terutama tenaga fungsional P2UPD dan tenaga fungsional umum. Namun secara keseluruhan tenaga fungsional telah mengikuti dan memiliki sertifikat untuk diangkat dalam jabatan fungsional telah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100% atau sebanyak 35 orang ditahun 2020.

## 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis *efisiensi* dilakukan dengan membandingkan antara outcome atau output penting dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian outcome atau output penting yang lebih besar dari realisasi keuangan dan atau capaian input mencapai di atas 100,00% menunjukkan bahwa sasaran strategis yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *efisien*. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian outcome atau output penting lebih kecil dari pada realisasi keuangan menunjukkan bahwa sasaran strategis yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *inefisien*. Sedangkan apabila terjadi capaian outcome atau output penting yang dilaksanakan oleh satuan kerja sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa sasaran strategis yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *sesuai harapan*.

a. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima yang menjadi kewenangan Inspektorat Kota Bima.

Analisis efisiensi sumber daya dilakukan hanya dengan menggunakan perbandingan dengan nilai Input atau Anggaran yang digunakan. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud dapat di ketahui dari capaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kota Bima dengan penyerapan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel 38. Analisis efisiensi

NO	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA REALISASI/CAPAIAN KINERJA SASARAN	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	92,54%	99,38%	Efisien 6,84%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari 2 (dua) indikator sasaran strategis pemerintah Kota Bima yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD bersifat kualitatif, dan indikator kinerja Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/Nilai SAKIP bersifat kuantitatif.

Untuk pengukuran indikator kinerja Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap LKPD pengukurannya dengan menggunakan konversi pada atribut indikator kinerja pendukung OPD dalam hal ini Inspektorat Kota Bima yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagai alat ukur perhitungan rata-ratanya. Sedangkan untuk pengukuran Indikator Indeks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/Nilai SAKIP pengukurannya dengan menggunakan atribut indikator kinerja Inspektorat Kota Bima yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dan perhitungannya menggunakan 4 (empat) indikator kinerja sebagai alat ukur perhitungan rata-ratanya. Adapun gambaran dari sasaran dan indikator kinerja pendukung Inspektorat Kota Bima dapat dilihat pada poin b dibawah ini.

- b. Analisis Efisiensi Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima sebagai pendukung sasaran strategis Pemerintah Kota Bima.

Analisis efisiensi sumber daya dilakukan hanya dengan menggunakan perbandingan dengan nilai Input atau Anggaran yang digunakan. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana dimaksud dapat di ketahui dari capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Bima dengan penyerapan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagai mana tabel dibawah ini :

Tabel 39. Analisis efisiensi

No	Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan	77,62 %	87,47%	99,87%	12,41 % Efisien

No	Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	60,98%	86,21%	99,90%	13,69 Efisien
		2. Persentase tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	71,88 %	78,13 %	99,82%	21,69% In Efisien
		3 Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Terdefinisi (3,04)	98,06%	99,95%	1,86% Efisien

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA						
Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima		Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	5	6	7	8
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks akuntabilitas 2 kinerja instansi pemerintah/Nilai SAKIP	86,62%	93,22%	98,03%	4,81% Efisien

No	Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Capaian	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	4 Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B	76,47%	92,86%	99,95%	7,09% Efisien
		5 Persentase SKPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM	37,93%	100,00%	99,40%	- 61,47% In Efisien
2	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1 Level Kapabilitas APIP	Level 3 (terdefinisi)	100,00%	99,97%	0,03% Efisien
		2 Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat	100,00%	100,00%	94,57%	5,43% Efisien



## 6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dianalisa dengan menggunakan analisis **efektivitas** dengan membandingkan antara input dengan output baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian outcome yang lebih besar dari pada realisasi keuangan dan atau capaian output mencapai diatas 100,00% menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan **efektif**. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian output lebih kecil dari pada realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan **inefektif**. Sedangkan apabila terjadi capaian output sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan **sesuai harapan**.

Efektifitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator output/*outcome*, *benefit* dan *impact* dari kegiatan yang bersangkutan. Efektifitas kegiatan dibagi atas dua macam, yaitu : (a) efektifitas individual kegiatan; (b) efektifitas terkait dengan pencapaian sasaran.

Adapun gambaran analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja dilihat dari sisi efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 40. Analisis efektifitas atas pelaksanaan program dan kegiatan

No	Uraian Sasaran Strategis Inspektorat	Indikator Utama Inspektorat dan Program dan Kegiatan Pendukung	Indikator Program dan Kegiatan	Efektifitas		
				Input (%)	Output/Outcome (%)	Ket
1	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material		99,90%	60,98%	In Efektif
		a. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a. Persentase menurunnya temuan APIP dan BPK	93,36%	72,00%	In Efektif
		1) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	1) Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan	99,99%	87,50%	In Efektif
		2) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	2) Jumlah OPD yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa yang dikawal (Probity dan Monev)	100,00%	83,33%	In Efektif
		b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	b. Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Bima sesuai dengan SAP dan SPI	99,77%	100,00%	Efektif
		1) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1) Jumlah OPD yang Laporan keuangannya Sesuai dengan SAP dan SPI	99,94%	100,00%	Efektif
		2) Reviu Penyerapan Anggaran	2) Persentase Penyerapan Anggaran OPD	99,98%	100,00%	Efektif
		3) Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	3) Persentase Penyerapan Anggaran PBJ (belanja Modal)	99,99%	96,40%	In efektif
		4) Reviu RKPD	4) Persentase Kesesuaian Rencana Kerja dengan DPA	98,20%	96,40%	In efektif

No	Uraian Sasaran Strategis Inspektorat	Indikator Utama Inspektorat dan Program dan Kegiatan Pendukung	Indikator Program dan Kegiatan	Efektifitas		
				Input (%)	Output/Outcome (%)	Ket
		5) Review KUA PPAS DAN KUPA PPAS perubahan	5) Persentase Kesesuaian Kebijakan Umum Anggaran dengan DPA	99,95%	96,40%	In efektif
		2) Persentase tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK		99,82%	71,88 %	In efektif
		a) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a) Persentase menurunnya temuan APIP dan BPK	99,82%	72,00 %	In efektif
		1) Inventarisasi hasil temuan pengawasan	1) Jumlah dokumen Hasil Inverisasi temuan pengawasan	96,17%	100,00%	Efektif
		2) Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	2) Jumlah Laporan hasil Pemantauan penyelesaian Atas Hasil Pemeriksaan	99,98%	66,67%	In efektif
		3) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	3) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan	99,98%	88,24%	In efektif
		4) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	4) Jumlah Dokumen Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan.	99,98%	75,00%	In efektif
		3) Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima		99,95%	Terdefinisi	efektif
		a) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a) Persentase menurunnya temuan APIP dan BPK	99,95%	Terdefinisi	efektif

No	Uraian Sasaran Strategis Inspektorat	Indikator Utama Inspektorat dan Program dan Kegiatan Pendukung	Indikator Program dan Kegiatan	Efektifitas		
				Input (%)	Output/Outcome (%)	Ket
		1) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	1) Jumlah dokumen Sistem dan prosedur yang terselesaikan	99,95%	100,00%	efektif
		2) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Maturitas Apip	2) Jumlah OPD yang dinilai Maturitas SPIP	99,95%	100,00%	efektif
		4 Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B		99,95%	76,47%	In efektif
		a Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Meningkat	99,95%	80,00%	In efektif
		1) Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	99,89%	100,00%	efektif
		2) Reviu LAKIP	2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu SAKIP	99,98%	100,00%	efektif
		3) Reviu RKA	3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu RKA	99,98%	100,00%	efektif
		4) Reviu LPPD	4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu LPPD	99,92%	100,00%	efektif
		5 Persentase SKPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM		99,95%	37,93%	In efektif
		a Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Meningkat	99,96%	37,93%	In efektif
		1) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	99,88%	100,00%	efektif

No	Uraian Sasaran Strategis Inspektorat	Indikator Utama Inspektorat dan Program dan Kegiatan Pendukung	Indikator Program dan Kegiatan	Efektifitas		
				Input (%)	Output/Outcome (%)	Ket
		2) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Bima	100,00%	50,00%	In efektif
2.	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1 Level Kapabilitas APIP		99,74%	Level 3 (Terdefinisi)	efektif
		a Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	a. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	99,99%	100%	efektif
		1) Pelaksanaan Penilaian AKJG	1) Jumlah ASN yang dinilai AKJG	99,99%	100%	efektif
		2) Pengelolaan Website dan Aplikasi	2) Jumlah Website OPD dan Aplikasi Lainnya yang diisi/dikelola	99,99%	100%	efektif
		b Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	b Jumlah Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang terpenuhi untuk Level 3	99,93%	100%	efektif
		1) Pengendalian manajemen pelaksanaan Kapabilitas APIP	1) Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	99,93%	100%	efektif
		2 Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat		94,57%	100%	efektif
		a Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	a Persentase ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, subrtasi, penjenjangan, dan profesi	94,57%	100%	efektif
		1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa	1) Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti	94,29%	100%	efektif

No	Uraian Sasaran Strategis Inspektorat	Indikator Utama Inspektorat dan Program dan Kegiatan Pendukung	Indikator Program dan Kegiatan	Efektifitas		
				Input (%)	Output/Outcome (%)	Ket
		dan aparatur pengawasan	Pendidikan penjenjangan			
		2) Bimtek pengawasan Operasional	3) Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Bimtek pengawasan Operasional	99,96%	100%	efektif

Selama tahun 2020, Inspektorat Kota Bima melaksanakan 24 (dua puluh empat) kegiatan dari 4 (empat) program strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerjanya diperoleh gambaran bahwa sebanyak 15 (lima belas) kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, dan 9 (tujuh) kegiatan tidak efektif.

Belum efektifnya pelaksanaan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Meningkat, lebih disebabkan oleh Minimnya perangkat daerah yang diusulkan sebagai WBK/WBBM di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Demikian juga dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Meningkat belum efektif pelaksanaannya disebabkan oleh Perubahan sistem maupun kebijakan dalam pengelolaan anggaran yang akan merubah alur proses kerja yang sudah direncanakan awal perencanaan sehingga OPD perlu menyesuaikan kembali dengan kebijakan yang berlaku.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yang belum efektif, dimana yang menjadi indikator kinerjanya adalah Persentase menurunnya temuan APIP dan BPK belum mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain masih rendahnya keseriusan OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi Temuan APIP dan BPK, kurangnya kooperatif dari penanggungjawab atas rekomendasi temuan, penanggungjawab/yang bersangkutan

meninggal dunia, tindak lanjut belum secara tuntas dan nyata hanya sebagian – sebagian secara menyicil atau bertahap.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun anggaran 2020 total pagu anggaran Inspektorat Kota Bima untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang dibiayai dengan dana APBD sebesar Rp.8.415.666.070,65 (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Koma Enam Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.8.117.503.091,00 (Delapan Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah), atau 96,46%. (Sembilan Puluh Enam Koma Empat Puluh Enam Porsen).

Sementara anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang diharapkan sebagaimana tertuang didalam APBD sebesar Rp.2.417.418.047,00 dengan Realisasi sebesar Rp.2.402.422.750,00 atau realisasi sebesar 99,38%.

Berikut ini akan disajikan besaran anggaran, capaian realisasi anggaran pada masing- masing program kegiatan.

Tabel 41 : Capaian realisasi anggaran program/kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG)	PORSEN TASE
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>50.950.000,00</b>	<b>50.947.000,00</b>	<b>(3.000,00)</b>	<b>99,99%</b>
1	Pelaksanaan Penilaian AKJG	23.950.000,00	23.947.000,00	(3.000,00)	99,99%
2	Pengelolaan Website dan Aplikasi	27.000.000,00	27.000.000,00	(0,00)	100,00%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>76.764.000,00</b>	<b>76.674.000,00</b>	<b>(90.000,00)</b>	<b>99,88%</b>
1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	13.010.000,00	13.004.000,00	(6.000,00)	99,95%
2	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	37.978.000,00	37.910.000,00	(68.000,00)	99,82%
3	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	25.776.000,00	25.760.000,00	(16.000,00)	99,94%
4	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	38.211.075,00	38.189.075,00	(22.000,00)	99,94%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG)	PORSEN TASE
1	2	3	4	5	6
5	Review penyerapan anggaran	147.850.000,00	147.825.000,00	(25.000)	99,98%
6	Reviuw penyerapan pengadaan barang dan jasa	179.925.000,00	179.921.000,00	(4.000,00)	100,00%
7	Reviu LPPD	43.665.000,00	43.629.000,00	(36.000,00)	99,92%
8	Reviu RKPD	56.020.000,00	55.010.000,00	(1.010.000,00)	98,20%
9	Reviu LAKIP	26.250.000,00	26.220.000,00	(30.000,00)	99,89%
10	Reviu RKA	84.865.000,00	84.852.000,00	(13.000,00)	99,98%
11	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	39.377.800,00	39.328.800,00	(49.000,00)	99,88%
12	Verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan Korupsi	80.425.000,00	80.425.000,00	(0,00)	100,00%
13	Evaluasi LAKIP pemerintah daerah	49.672.000,00	49.656.000,00	(16.000,00)	99,97%
14	Review KUA PPAS DAN KUPA PPAS perubahan	57.940.000,00	57.911.000,00	(29.000,00)	99,95%
<b>III</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian</b>	<b>1.656.583.000,00</b>	<b>1.654.837.403,00</b>	<b>(1.745.597,00)</b>	<b>99,89%</b>
1	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	400.800.000,00	400.779.000,00	(21.000,00)	99,99%
2	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	209.075.000,00	209.075.000,00	(0,00)	100,00%
3	Inventarisasi hasil temuan pengawasan	27.175.000,00	26.135.000,00	(1.040.000,00)	96,17%
4	Tidak lanjut hasil temuan pengawasan	279.250.000,00	279.241.000,00	(9.000,00)	100,00%
5	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	237.683.000,00	237.645.403,00	(37.597,00)	99,98%
6	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	58.075.000,00	58.063.000,00	(12.000,00)	99,98%
7	Pemantauan LHKASN	0,00	0,00	(0,00)	0,00%
8	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kapabilitas Apip	39.300.000,00	39.273.000,00	(27.000,00)	99,93%
9	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	35.865.000,00	35.847.000,00	(18.000,00)	99,95%
10	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Maturitas Apip	43.500.000,00	43.480.000,00	(20.000,00)	99,95%
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR</b>	<b>231.544.172,00</b>	<b>218.970.472,00</b>	<b>(12.573.700,00)</b>	<b>94,57%</b>
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	220.060.000,00	207.486.300,00	(12.573.700,00)	94,29%
2	Pelatihan Teknik Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG)	PORSEN TASE
1	2	3	4	5	6
3	Bintek Pengawasan	11.484.172,00	11.484.172,00	0,00	100,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.417.418.047,00</b>	<b>2.402.422.750,00</b>	<b>14.995.297,00</b>	<b>99,38%</b>

Secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan pertanggung jawabannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bima tahun 2020 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Kota Bima berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga dimaksudkan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Dalam tahun 2020 sesuai dengan kewenangannya Inspektorat Kota Bima menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran pemerintah Kota Bima dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Sedangkan sasaran strategis Inspektorat Kota Bima sebagai pendukung sasaran dan indikator kinerja Pemerintah Kota Bima telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja.

Adapun Pencapaian Sasaran Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sasaran strategis Inspektorat Kota Bima sebagai sasaran pendukung sasaran pemerintah Kota Bima. Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan terdapat 1 (satu) sasaran telah mencapai target dengan nilai rata-rata sebesar 58,97% dari rata-rata target sebesar 50,00%. Sedangkan 1 (satu) sasaran belum mencapai target dengan nilai rata-rata target sebesar 81,36% dengan rata-rata capaian sebesar 78,24%. Adapun faktor penyebab dari permasalahan belum tercapainya target adalah :

- a. Masih rendahnya capaian kinerja tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang disebabkan oleh
  1. Kurangnya kooperatif/keseriusan Penanggungjawab untuk menindaklanjuti rekomendasi Temuan APIP dan BPK baik yang bersifat administratif maupun material;
  2. Tindak lanjut rekomendasi yang bersifat material belum secara tuntas dan nyata hanya sebagian-sebagian secara menyicil atau bertahap,

3. Belum optimalnya waktu pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil temuan.
- b. Masih rendahnya capaian kinerja SKPD yang dibangun zona integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM yang disebabkan oleh :
  1. Masih minimnya perangkat daerah yang diusulkan sebagai WBK/WBBM di lingkungan Pemerintah Kota Bima;
  2. Keterbatasan data pendukung proses pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
  3. Masih kurangnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

## **B. SARAN**

Strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan adalah :

- a. Peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK melalui langkah-langkah sebagai berikut
  1. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang teknik tindak lanjut yang baik dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses tindak lanjut;
  2. Mengoptimalkan penerapan punishment/sanksi terhadap OPD/penanggung jawab yang tidak serius menindaklanjuti rekomendasi temuan;
  3. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut diupayakan lebih optimal lagi, paling sedikit dua kali setahun.
- b. Meningkatkan capaian kinerja SKPD yang dibangun zona integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM melalui langkah -langkah sebagai berikut :
  1. Melakukan identifikasi terhadap OPD yang berpotensi sebagai WBK/WBBM;
  2. diperlukan indikator spesifik/ khusus yang mengatur pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Bima agar dapat mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;

3. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Demikian LKIP ini dibuat, guna perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang.

Raba – Bima, Februari 2020



Inspektur,

**Muhaimin, SE**

Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19620217 199003 1 010